

**SKRIPSI**

**DONI ADINEGARA**

**PENCATATAN KELAHIRAN SEBAGAI SALAH SATU  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK**



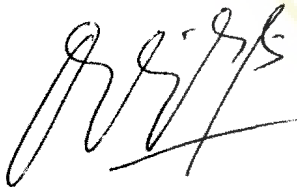
**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PENCATATAN KELAHIRAN SEBAGAI SALAH SATU  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Lilik Pudjiastuti, S.H., MS.**  
**NIP. 132049475**

**Penyusun,**



**Doni Adinegara**  
**NIM 039910426/U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah mempelajari keseluruhan materi penulisan skripsi, dapat disimpulkan beberapa pendapat yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah cukup memadai mengingat dalam segala segi hukum yang ada di Indonesia sudah menempatkan kedudukan anak dalam posisi yang khusus, tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat masih banyak terjadi pengeksploitasian anak yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, oleh karena itu peran advokasi perlindungan anak sangatlah diperluka dalam memperjuangkan hak anak.
2. Fungsi dari akta kelahiran di Indonesia sangatlah penting bagi seorang anak. Selain sebagai hak untuk memperoleh identitas pribadi dan kewarganegaraan, ternyata Akta kelahiran juga mempunyai fungsi yang penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang anak dalam kehidupan social, pendidikan, hukum dan HAM.

**B. SARAN:**

Dengan memperhatikan keseluruhan materi penulisan seperti yang terurai tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan guna kepentingan peningkatan pelayanan publik selanjutnya adalah:

- Perlu adanya lembaga/ yayasan atau sejenisnya, yang dapat memberikan perlindungan, membantu pengurusan Akta Kelahiran untuk Anak-anak terlantar/ Anak jalanan.
- Kemungkinan dilakukannya pelayanan gratis atau disubsidi, mengingat bahwa pelaksanaannya adalah menyangkut kepentingan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai UU No 23 tahun 2002.
- Mengganti istilah 'Di Luar Nikah' dalam catatan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir tanpa Akta Nikah, dengan istilah lain yang lebih manusiawi. Misalnya dengan kata-kata sandi: 'Khusus', atau yang lain-lain yang dianggap lebih tepat.
- Memberi kesempatan kepada kelompok 'agama' di luar 5 agama yang diakui negara untuk dapat memperjuangkan keyakinan kelompoknya melalui jalur Hukum dan HAM, agar "agamanya" dimaksud mendapatkan legalitas sebagai agama baru yang diakui negara. Dengan demikian, hasilnya hanya akan berbentuk "ketentuan tambahan" yang tidak

akan mengubah perundang-undangan yang ada, dimana ketetapannya jelas menyebutkan bahwa suatu pengesahan perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum Agama masing-masing.

- Perlu disiapkan kerangka-kerangka hukum dalam upaya perlindungan anak yang dalam pelaksanaanya diwakilkan pada orang tua atau pengampu anak tersebut, untuk memperoleh hak-hak anak secara menyeluruh.

